

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUNAN (PKT)
TAHUN 2019**

**PENGADILAN NEGERI
AMLAPURA**



PENGADILAN NEGERI AMLAPURA

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN NEGERI AMLAPURA**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Gede Putra Astawa, SH. MH.

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Amlapura

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : I Ketut Gede, SH. MH.

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama pada tahun 2019 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Pihak Kedua

Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar,

Amlapura, 2 Januari 2019

Pihak Pertama

Ketua Pengadilan Negeri Amlapura,

I Ketut Gede, SH. MH.

Nip. 19520615 197902 1 001

Gede Putra Astawa, SH. MH.

Nip. 19770607 200112 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2019
PENGADILAN NEGERI AMLAPURA**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana	100 % 100 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu : - Perdata - Pidana	90 % 100 %
		c. Persentase penurunan sisa perkara : - Perdata - Pidana	30 % 90 %
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - PK	100%
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	40 %
		f. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	95 %
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima oleh para pihak Tepat Waktu.	100 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan dengan Mediasi	10 %
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu.	100 %
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 harisetelah diputus.	0 %
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentaseperkara prodeo yang diselesaikan.	2 %
		b. Persentase perkara diselesaikan diluar gedung pengadilan.	0 %
		c. Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).	100 %
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	a. Persentase perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	80 %

Kegiatan

Anggaran

1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MA Rp . 3.677.015.000,-
2. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Rp . 74.400.000,-

Pihak Kedua
Ketua Pengadilan Tinggi Bali,

I Ketut Gede, SH. MH.
Nip. 19520615 197902 1 001

Amlapura, 2 Januari 2019
Pihak Pertama
Ketua Pengadilan Negeri Amlapura,

Gede Putra Astawa, SH. MH.
Nip. 19770607 200112 1 001